



OPEN ACCESS

Sitasi: Purnamo, D., Wicaksono, F., Dante, P., Purnama, A., C., & Ayulinda, D. (2025). Memahami Instrumentasi Inovasi Kebijakan: Studi *Policy Hackathon* pada Program Cimahi *Innovathon Days* di Kota Cimahi. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 159–171. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.159-171>

Dikirim: 13 Agustus 2024

Diterima: 31 Januari 2025

Diterbitkan: 31 Januari 2025

© Penulis



Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi
Creative Commons Atribusi-NonKomersial-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Kata Kunci: Transformasi Digital, Inovasi, Program Tuka Tuku Purbalingga, Pelayanan Publik, Ekonomi Lokal.

ARTIKEL

Memahami Instrumentasi Inovasi Kebijakan

Studi *Policy Hackathon* pada Program Cimahi *Innovathon Days* di Kota Cimahi

Understanding Policy Innovation Instrumentation

Study of a Policy Hackathon at the Cimahi Innovathon Days Program in Cimahi City

Dwi Purnomo ¹, Ferdiansyah Wicaksono ², Puntigavere Dante ³, Adet Chandra Purnama ⁴, Dini Ayulinda ⁵

¹ Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. ^{2,3} PT. Lingkar Riset Inklusif. ^{4,5} Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi.

dwi.purnomo@unpad.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi peran *policy hackathon* sebagai instrumen inovasi dalam pengembangan kebijakan publik melalui studi kasus program Cimahi *Innovathon Days* di Kota Cimahi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana *policy hackathon* dapat menghasilkan solusi kebijakan yang relevan dan berkelanjutan di tingkat lokal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami konteks terkait *policy hackathon* yang masih jarang dibahas dalam konteks praktis dalam studi kasus kebijakan publik di Indonesia, sebagai salah satu metode dalam perumusan kebijakan publik partisipatif. Metodologi yang digunakan adalah analisis wacana (*discourse analysis*) yang melibatkan pengamatan langsung dan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *policy hackathon* dapat menjadi salah satu alternatif perumusan kebijakan yang partisipatif melibatkan publik secara umum. Selain itu, fokus pada kebutuhan warga, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan dampak nyata yang terukur menjadi faktor penting dalam proses ini. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi potensi besar *policy hackathon* dalam menciptakan solusi inovatif yang dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Implikasi praktis dari temuan ini mencakup pentingnya memperkuat kolaborasi antar sektor dalam perumusan kebijakan serta perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan instrumen kebijakan baru yang dapat diadopsi di berbagai wilayah lainnya.

Abstract: This research explores the role of policy hackathons as an innovation instrument in public policy development through a case study of the Cimahi Innovathon Days program in Cimahi City. The background of this research is based on the need to understand how policy hackathons can produce relevant and sustainable policy solutions at the local level. The main objective of this research is to understand the context related to policy hackathons, which are still rarely discussed in practical terms in public policy case studies in Indonesia, as one of the methods in participatory public policy formulation. The methodology used is discourse analysis, which involves direct observation and interviews with the stakeholders involved. The research results indicate that the implementation of policy hackathons can be one alternative for participatory policy formulation involving the general public. Additionally, focusing on the needs of citizens, responsible leadership, and measurable real-world impact are

Keywords: Policy hackathon, Program innovation instrumentation, Cimahi.

important factors in this process. The conclusion of this research underscores the great potential of policy hackathons in creating innovative solutions that can be effectively implemented at the local level. The practical implications of these findings include the importance of strengthening inter-sectoral collaboration in policy formulation and the need for ongoing evaluation of the long-term impacts of the resulting policies. This research also opens up opportunities for the development of new policy instruments that can be adopted in various other regions.

1. Pendahuluan

Inovasi adalah sebuah ide, objek, dan praktik yang dianggap baru (Orr, 2003). Pengertian lain juga menjelaskan bahwa inovasi sebagai kegiatan proses menciptakan jasa atau barang yang sifatnya baru, lebih baik dan terjangkau dibandingkan dengan yang telah tersedia sebelumnya (Damanpour, 1992). Walaupun bahwa inovasi juga tidak selamanya bersifat baru (*completely new*), biasanya dapat terjadi karena sebuah proses yang dikenal dengan nama re-invention yakni proses penemuan kembali inovasi secara orisinil dari jasa atau barang yang sudah ada (Vargo & Lusch, 2010). Inovasi dapat terjadi dalam setiap tahap sistem, yaitu *input*, proses, dan *luaran*. Karena inovasi tidak hanya berbicara pada temuan produk baru, namun juga pada sistem dan prosesnya (Garud et al., 2016). Ketika inovasi diadopsi dan didifusikan terhadap masyarakat, knowledge stock negara terakumulasi yang nantinya akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan produktivitas, penciptaan kemakmuran untuk standar hidup publik yang lebih tinggi (Cutchins, Raw, & Welsh, 2010). Menempatkan inovasi pada masyarakat sebagai subjek, yang serupa dengan mendorong terciptanya inovasi dalam sektor publik. Inovasi dalam sektor publik sendiri sejatinya bukanlah hal baru, merujuk historisnya telah dimulai sejak tahun 1980an di Inggris seiring dikenalnya sebutan *reinventing government* atau *New Public Management* (Hendrawan, 2019).

Kajian mengenai inovasi memang cenderung sering dibahas akademisi dan praktisi dalam sektor bisnis, dikarenakan sektor bisnis dinamis dan formalisasi yang rendah jika dibandingkan dengan sektor publik yang organisasinya kurang leluasa untuk berinovasi (Suwarno, 2008). Oleh karenanya, inovasi adalah konsep kompleks, dimana sistem yang multidimensional serta mengglobal meliputi beragam faktor, proses dan agen yang terlibat didalamnya bersifat interaktif dari bermacam sumber daya yang dipadukan menjadi satu (Osborne & Brown, 2011). Dari sistem inovasi yang amat kompleks dan multidimensional inilah yang pada akhirnya perlu diiringi keahlian kepemimpinan dan koordinasi yang kuat, bilamana inovasi tersebut diadopsi pada sektor publik utamanya oleh pemerintahan melalui kebijakan publik, karena kebijakan publiklah yang menentukan keberhasilan termasuk inovasi yang tercipta pada sektor privat sekalipun karena pasti terdapat determinasi kebijakan publik di dalamnya yang akhirnya akan terakumulasi menjadi pembangunan berorientasi kepada publik yang inovatif (Skarzynski & Gibson, 2008).

Eksistensi inovasi pada sektor publik di Indonesia sendiri telah didukung oleh pemerintah yang mengarah pada pengembangan inovasi tingkat lokal atau daerah (Destiana, 2023). Adapun pengertian inovasi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yakni semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menginisiasi, menjalankan, dan mengelola inovasi sektor publik perlu disadari akan pemahaman yang mumpuni ragam keterampilan dan pengetahuan menjadi prasyarat (Khademian et al., 2013). Kualitas peraturan daerah menjadi indikator penting salah satunya dalam prasyarat yang berdampak strategis (Hasthoro & Sunardi, 2016). Trend inovasi kebijakan publik di Indonesia juga saat ini masih seringkali dicirikan dengan diciptakannya suatu platform aplikasi baru, tetapi ketika aplikasi tersebut diluncurkan kemudian tidak lama kemudian tidak

dipergunakan kembali. Bahkan sejak tahun 2022 terdapat 24.000 aplikasi pemerintah yang dihentikan operasionalnya oleh Kominfo karena tidak lagi efisien serta boros anggaran negara (Uly, 2023). Organisasi publik dituntut untuk inovatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan mengacu pada hal efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan cepat tanggap (Nam, 2019).

Persoalan minimnya kemampuan dan kemauan berinovasi menjadi tantangan inovasi di sektor publik utamanya bagi kalangan pejabat publik di pemerintahan, sehingga stagnasi kebijakan publik terjadi yang mengakibatkan kinerja tata pemerintahan dan daya serap aspirasi publik belum optimal (Tobirin, 2020). Syarat penting dalam terciptanya inovasi sektor publik yakni munculnya ide dan gagasan dari pejabat publik sebagai titik awal implementasi kebijakan, yang mampu mengadopsi dan beradaptasi terhadap perkembangan diluar organisasi public (Darusman, 2017). Paradigma terkait inovasi yang masih berfokus pada pengembangan produk baru yang memenuhi permintaan pasar/publik (Salerno et al., 2015) masih dianggap relevan dengan kondisi saat ini. Namun, dalam praktiknya, inovasi sering kali hanya dipahami sebagai penciptaan aplikasi atau produk baru. Pendekatan sempit ini justru berpotensi menyebabkan stagnasi dalam inovasi kebijakan (Schot et al., 2016).

Dominannya pemimpin dalam menetapkan program atau sistem dan bawahan kurang partisipatif dalam melaksanakan inisiatif serta kurang melibatkan partisipasi publik (Irvin & Stansbury, 2004). Keberadaan pemimpin sangatlah penting karena tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan (Fatayati, 2020). Tetapi tidak mengacu pada siapa yang memimpin, tetapi saat publik menyalurkan saran, secara sistemik segera direspon oleh pejabat public (Hadna, 2006). Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan telah menjadi semakin penting, dengan perubahan cepat dalam kebutuhan dan harapan masyarakat (Iskandar, 2017). Di tengah dinamika ini, konsep "*policy hackathon*" muncul sebagai sarana yang menjanjikan untuk mempercepat proses difusi inovasi kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil (Chaminade et al., 2009). Dalam konteks ini, sebuah *policy hackathon* telah diadakan sebagai salah satu bagian dari program ini, dengan fokus pada identifikasi dan pengembangan solusi kebijakan yang relevan dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat setempat (Yuan & Gasco-Hernandez, 2021). Meskipun *policy hackathon* diterapkan sebagai instrumen untuk memfasilitasi inovasi kebijakan, pemahaman mendalam tentang proses dan dampak dari partisipasi dalam perancangannya terbatas oleh literturnya (Johnson & Robinson, 2014). Salah satu contoh implementasi praktis dari konsep ini adalah program Cimahi *Innovathon Days* di Kota Cimahi. Lokus penelitian di Kota Cimahi dipilih karena kemampuannya mempertahankan keberlanjutan inovasi dan prestasi dalam kompetisi inovasi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks terkait *policy hackathon* dan praktisnya, dengan fokus khusus pada studi kasus dari Cimahi *Innovathon Days*.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian tindakan (*action research*) dan studi kasus untuk mendalami proses dan dampak suatu kebijakan dalam ini terkait program *policy hackathon* di Kota Cimahi (Tawakkal, & Rohman, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan partisipan dan melakukan intervensi yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan, sementara studi kasus memberikan fokus pada isu spesifik terkait inflasi dan penanggulangan kemiskinan daerah (Widyastuti et al., 2024). Lokus penelitian di Kota Cimahi dipilih karena kemampuannya mempertahankan keberlanjutan inovasi dan prestasi dalam kompetisi inovasi nasional. Studi kasus melibatkan tujuh isu permasalahan publik:

sampah, sanitasi, partisipasi perempuan, ketahanan pangan, UMKM, dan stunting, dimana isu-isu tersebut yang menjadi kluster tema pembahasan dalam Cimahi *Innovathon Days*. Isu-isu ini diobservasi melalui metode *policy hackathon*. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor masyarakat yang menjadi pegiat dalam tujuh isu tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan rekomendasi terkait isu-isu publik yang dihadapi. Data sekunder diperoleh dari penelusuran artikel jurnal ilmiah, artikel berita, serta dokumen-dokumen kedinasan yang relevan. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks tambahan dan memperkaya analisis penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah *discourse analysis*. Analisis ini membantu untuk mengeksplorasi bagaimana wacana tersebut membentuk dan dipengaruhi oleh kebijakan publik serta interaksi antara berbagai aktor yang terlibat (Alam, 2021). Data primer dan sekunder yang dikumpulkan serta analisis yang dilakukan memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika kebijakan publik di tingkat lokal, yang diharapkan dapat memperkaya literatur dan praktik inovasi kebijakan di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran umum perkembangan inovasi di Pemerintah Kota Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam bidang inovasi, dengan berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi operasional pemerintahan (Susanty & Yuningsih, 2021). Salah satu pilar utama inovasi adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang mencakup pengembangan 144 aplikasi yang telah tersedia di Kota Cimahi untuk memfasilitasi akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat (Barsei et al., 2023). Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi Kota Cimahi dalam mengembangkan konsep *Smart City* yang komprehensif, mencakup enam dimensi pelayanan publik (Nugraha et al., 2022). Salah satu inovasi penting adalah portal terintegrasi Polakami, yang menjadi *platform* sentral untuk berbagai layanan pemerintah dan mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Hardiana, 2024).

Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga membawa dampak positif pada kehidupan masyarakat Cimahi. Melalui pengembangan aplikasi dan sistem digital, warga dapat dengan mudah mengakses informasi, mengurus dokumen, dan mendapatkan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan (Vujković et al., 2022). Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meminimalkan risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah Kota Cimahi juga bekerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mendorong inovasi dan mencari solusi kreatif bagi berbagai masalah publik. Dengan kolaborasi ini, inovasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan, dapat diterapkan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (José & Rodrigues, 2024).

3.2. *Policy hackathon* dalam Program Cimahi *Innovathon Days*

Program Cimahi *Innovathon Days* memanfaatkan metode ini untuk menjawab tantangan lokal seperti pengangguran dan ketahanan pangan. Untuk memahami penerapan *policy hackathon* secara efektif, perlu penjelasan konseptual yang mencakup definisi konsep, proses ideal implementasi, serta parameter keberhasilannya.

Secara konseptual, *policy hackathon* berbeda dari proses kebijakan konvensional yang birokratis karena menekankan partisipasi aktif dan pemecahan masalah berbasis data. Proses ideal pelaksanaannya meliputi persiapan melalui identifikasi tantangan kebijakan dan pemilihan pemangku kepentingan, eksplorasi masalah dengan pengumpulan data serta diskusi komunitas, ideasi untuk menghasilkan solusi kreatif, prototyping kebijakan, serta evaluasi solusi berdasarkan relevansi dan keberlanjutannya. Keberhasilan *policy hackathon* dapat diukur dari relevansi solusi yang dihasilkan, tingkat kolaborasi lintas sektor, kelayakan implementasi, inovasi yang diperkenalkan, serta dampak nyata yang ditimbulkan bagi masyarakat. Penjelasan konseptual ini penting untuk memberi pemahaman yang jelas bagi pembaca tentang posisi *policy hackathon* sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kebijakan inovatif yang relevan dan berkelanjutan (Cameron, 2018).

Dalam konteks Cimahi *Innovathon Days*, *Policy Hackathon* dilaksanakan dengan mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah-masalah publik (Concilio et al., 2017). Proses observasi untuk mengetahui kondisi dari setiap isu-isu publik yang dipilih dalam Cimahi *Innovathon Days* dielaborasi dengan gagasan *Design Thinking*, yang terdiri dari lima tahapan: *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test*. Proses ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi masalah dan peluang tetapi juga dalam membangun konsensus di antara pemangku kepentingan mengenai solusi yang diusulkan (Nurza, 2024). Dengan bimbingan fasilitator, peserta dapat memperdalam pemahaman mereka tentang tantangan yang dihadapi masyarakat Cimahi dan mengembangkan solusi yang berdampak nyata. Hasil dari *Policy Hackathon* ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan untuk Kota Cimahi. Dengan menggabungkan konsep instrumentasi kebijakan inovatif melalui *Policy Hackathon*, Cimahi *Innovathon Days* berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi publik, memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, dan mendorong implementasi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Day et al., 2017).

3.3. Isu strategis untuk instrumentasi kebijakan inovatif di Kota Cimahi

Pemilihan isu-isu ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi Kota Cimahi dalam mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Misalnya, pengangguran tetap menjadi masalah yang signifikan, terutama di kalangan lulusan muda yang kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki (Mostafa et al., 2014). Di sisi lain, UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal, menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha, digitalisasi, dan akses pasar yang lebih luas (Meinzen-Dick et al., 2019). Ketahanan pangan juga menjadi perhatian penting, terutama dalam menjaga kedaulatan pangan lokal dan mengatasi ancaman terhadap keberlanjutan produksi pangan tradisional (Mishra & Mishra, 2012). Kemudian, isu stunting yang merupakan indikator penting kesehatan masyarakat, menjadi fokus dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak (Smith & Haddad, 2014). Sanitasi dan persampahan adalah isu lingkungan yang berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem perkotaan (Misdayanti, 2021). Terakhir, partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan gender (Kabeer, 2021). Berikut juga akan disajikan temuan-temuan selama observasi hingga pengusulan inovasi instrumentasi kebijakan berdasarkan tujuh isu strategis sebagai berikut:

3.3.1. Pengangguran

Pengangguran di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus utama karena tingginya jumlah lulusan muda yang belum terserap di dunia kerja. Melalui observasi pada persona seperti Asep, seorang lulusan SMK yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, diidentifikasi bahwa kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan kebutuhan pasar kerja menjadi faktor utama penyebab pengangguran. Program yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah *One-Cim*, sebuah inisiatif yang mengintegrasikan konsultasi karir, tes minat dan bakat, serta pelatihan keterampilan melalui *platform* yang sudah ada seperti SIDEKAP. Program ini dirancang untuk memberikan bimbingan yang lebih terfokus kepada pencari kerja muda dan membantu mereka dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

3.3.2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM di Kota Cimahi menghadapi berbagai tantangan, termasuk legalitas usaha, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Observasi terhadap pelaku usaha seperti pengusaha keripik menunjukkan bahwa banyak UMKM masih beroperasi secara informal dan belum mampu memanfaatkan peluang digital secara optimal. Solusi yang diusulkan adalah program *Entrepreneur Legacy*, yang mencakup pembentukan komunitas UMKM, pembinaan spesialisasi produk, dan dukungan legalitas usaha seperti sertifikasi halal dan izin edar. Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

3.3.3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi isu yang krusial, terutama dalam konteks menjaga keberlanjutan pangan lokal seperti yang ditemukan di kampung adat Cireundeu. Persona seperti Abah Widi, seorang sesepuh kampung, menunjukkan kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan dan hilangnya kebiasaan konsumsi singkong sebagai sumber pangan utama. Program *One Day No Rice* diusulkan sebagai solusi untuk mendukung diversifikasi pangan dan melindungi kebiasaan konsumsi lokal. Program ini melibatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan, dengan dukungan dari sekolah, petani, dan UMKM lokal untuk mempromosikan konsumsi singkong dan produk pangan alternatif lainnya.

3.3.4. Stunting

Stunting diidentifikasi sebagai masalah kesehatan yang mendesak, terutama bagi keluarga-keluarga yang kurang mendapat akses informasi yang memadai mengenai gizi dan kesehatan anak. Observasi terhadap persona seperti Ibu Ika mengungkapkan kebutuhan untuk meningkatkan edukasi dan dukungan yang lebih personal bagi keluarga yang terdampak *stunting*. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan program sosialisasi dan edukasi yang tidak menstigma keluarga, serta peningkatan keterlibatan komunitas dan layanan kesehatan dalam menangani masalah *stunting*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa keluarga-keluarga yang terdampak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

3.3.5. Sanitasi

Sanitasi merupakan salah satu isu lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Kota Cimahi. Banyak wilayah di kota ini masih mengalami

masalah dalam akses air bersih dan fasilitas toilet yang layak. Observasi lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur sanitasi yang ada belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan populasi padat. Solusi yang diusulkan adalah pengembangan infrastruktur sanitasi yang lebih baik melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi proyek sanitasi. Program ini juga mencakup edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik untuk kesehatan dan lingkungan.

3.3.6. Persampahan

Pengelolaan sampah menjadi tantangan besar bagi Kota Cimahi, terutama dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan. Observasi terhadap persona seperti pengelola bank sampah menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengelola sampah secara lebih efisien, masih ada kendala dalam hal teknologi dan partisipasi masyarakat. Solusi yang diusulkan adalah pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih canggih serta strategi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mendaur ulang sampah. Program ini juga melibatkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di kota.

3.3.7. Partisipasi perempuan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Cimahi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal akses terhadap pelatihan dan peluang ekonomi. Observasi terhadap persona seperti anggota Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) menunjukkan bahwa banyak perempuan di Cimahi yang memiliki potensi besar tetapi terbatas aksesnya untuk mengembangkan keterampilan dan usaha mereka. Solusi yang diusulkan adalah program pemberdayaan perempuan yang menyediakan pelatihan keterampilan, akses modal, dan dukungan jaringan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor ekonomi dan sosial, serta memperkuat peran mereka dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan dari program-program di atas sebagian besar didukung oleh adanya kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini tidak hanya menciptakan sinergi dalam penciptaan kebijakan yang lebih inklusif, tetapi juga memungkinkan alokasi sumber daya dan pengetahuan yang lebih optimal dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat (Molinari, 2011). Keberlanjutan dari program-program ini pun sangat bergantung pada upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi dampak kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks ini, *policy hackathon* yang diterapkan melalui Cimahi *Innovathon Days* berperan sebagai metode strategis untuk merumuskan kebijakan inovatif dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data. Program ini mengundang pemangku kepentingan lintas sektor untuk merancang solusi yang aplikatif terhadap berbagai isu strategis tersebut. Misalnya, solusi inovatif untuk masalah pengangguran diwujudkan dalam program “One-Cim” yang menyediakan konsultasi karier dan pelatihan keterampilan berbasis *platform* digital untuk lulusan muda. Sementara itu, tantangan UMKM diatasi dengan program “Entrepreneur Legacy” yang memperkuat komunitas usaha lokal melalui pendampingan produk dan sertifikasi legalitas. Upaya menjaga ketahanan pangan lokal mendorong inisiatif “One Day No Rice” yang mengedukasi masyarakat tentang diversifikasi pangan berbasis konsumsi singkong di kampung adat Cireundeu. Selain itu, solusi berbasis komunitas untuk menangani *stunting* dan

sanitasi difasilitasi melalui pengembangan infrastruktur serta kampanye kesadaran masyarakat. Dalam pengelolaan sampah, kebijakan berbasis teknologi dan kemitraan dengan sektor swasta dirancang untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan, sementara kebijakan pemberdayaan perempuan membuka akses pelatihan keterampilan dan modal usaha. Implementasi *policy hackathon* ini membuktikan efektivitasnya dalam menghasilkan kebijakan publik inovatif yang berakar pada kebutuhan nyata masyarakat serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, menjadikannya model inspiratif bagi pembangunan berkelanjutan di daerah lain.

3.4. Pembahasan: Desain kebijakan untuk inovasi sektor publik

Pembahasan temuan atas observasi isu-isu strategis ini menggunakan teori tentang desain kebijakan yang mencakup enam konstruksi inti yang diperlukan untuk inovasi kebijakan: Memahami kompleksitas (*complexity*), Berorientasi pada visi (*vision*), Fokus pada warga negara (*citizen*), Membangun aliansi baru (*new alliances*), Kepemimpinan yang bertanggung jawab (*stewardship*), dan Penekanan pada dampak (*impact*) (Bason, 2016). Melalui analisis deskriptif terhadap tujuh isu strategis dalam program Cimahi *Innovathon Days* 2024 meliputi pengangguran, UMKM, ketahanan pangan, *stunting*, sanitasi, persampahan, dan partisipasi perempuan.

3.4.1. Memahami Kompleksitas (*Complexity*)

Dalam konteks penanganan pengangguran di Cimahi, kebijakan tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memahami dinamika pasar tenaga kerja, kesenjangan keterampilan, dan kebutuhan lokal. Kompleksitas ini teridentifikasi melalui observasi langsung dan interaksi dengan individu seperti Asep, seorang lulusan muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dengan memahami keterkaitan faktor-faktor tersebut, solusi yang lebih komprehensif dapat dirancang, seperti inisiatif *One-Cim* yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan dengan pencocokan pekerjaan berdasarkan minat dan bakat.

Pada kasus UMKM, kompleksitas meliputi tantangan legalitas usaha, keterbatasan sumber daya manusia, dan adopsi teknologi. Pendekatan yang memahami kompleksitas ini membantu dalam merancang program *Entrepreneur Legacy*, yang tidak hanya menekankan pembinaan usaha, tetapi juga aspek formalitas dan legalitas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar.

3.4.2. Berorientasi pada Visi (*Vision*)

Orientasi pada visi merupakan kemampuan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik dan menetapkan arah kebijakan menuju pencapaian visi tersebut. Visi yang jelas menjadi pedoman utama dalam mengarahkan inovasi kebijakan. Misalnya, pada isu ketahanan pangan, visi yang diusung adalah keberlanjutan pangan lokal melalui diversifikasi pangan dan pelestarian praktik konsumsi tradisional, seperti konsumsi singkong di kampung adat Cireundeu. Program *One Day No Rice* menggambarkan visi ini dengan tujuan menjaga kedaulatan pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada beras.

Dalam penanganan *stunting*, visi yang jelas sangat penting. Pendekatan yang diusulkan tidak hanya berfokus pada penanganan langsung masalah gizi, tetapi juga pada edukasi berkelanjutan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi perbaikan jangka panjang.

3.4.3. Fokus pada Warga Negara (*Citizen*)

Kebijakan publik yang efektif harus selalu berpusat pada kebutuhan dan harapan warga negara. Pada kasus pengelolaan sampah di Cimahi, kebijakan yang diusulkan mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kampanye edukasi dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dirancang bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga bersama masyarakat, sehingga kebijakan tersebut lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada isu partisipasi perempuan, fokus pada warga negara terlihat dalam program pemberdayaan perempuan yang dirancang untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan dan peluang ekonomi. Dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan inklusivitas dan kesetaraan dalam pembangunan.

3.4.4. Membangun Aliansi Baru (*New Alliances*)

Aliansi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Dalam program Cimahi *Innovathon Days*, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Misalnya, dalam menangani isu ketahanan pangan, kolaborasi dengan petani, sekolah, dan UMKM lokal sangat penting untuk memastikan diversifikasi pangan dan pelestarian budaya konsumsi lokal.

Begitu juga dalam isu UMKM, keberhasilan program *Entrepreneur Legacy* sangat bergantung pada kerja sama dengan lembaga keuangan, akademisi, dan sektor swasta untuk menyediakan pembinaan dan dukungan yang komprehensif bagi para pengusaha kecil. Aliansi-aliansi ini memungkinkan penggabungan sumber daya dan keahlian yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

3.4.5. Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab (*Stewardship*)

Pemimpin harus mampu mengkoordinasikan berbagai upaya, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam program Cimahi *Innovathon Days*, kepemimpinan lokal memainkan peran penting dalam mengarahkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dari *Policy Hackathon* dapat diimplementasikan secara efektif.

Pada isu sanitasi, kepemimpinan yang bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur sanitasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dikelola dengan baik. Kepemimpinan ini juga memastikan bahwa edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik terus berlanjut, sehingga dampak positif dapat dirasakan secara berkelanjutan.

3.4.6. Penekanan pada Dampak (*Impact*)

Penekanan pada dampak berarti bahwa kebijakan tidak hanya diukur dari proses atau output-nya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut berhasil memecahkan masalah yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Cimahi *Innovathon Days*, dampak dari inovasi kebijakan yang dihasilkan diukur dari kemampuan kebijakan tersebut dalam mengatasi isu-isu strategis seperti pengangguran, stunting, dan pengelolaan sampah.

Misalnya, dampak dari program *One-Cim* dapat diukur dari penurunan tingkat pengangguran di kalangan lulusan muda dan peningkatan keterampilan mereka.

yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Begitu juga dengan dampak dari program *One Day No Rice* yang diukur dari peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dan penurunan konsumsi beras yang berlebihan.

Pendekatan *Design for Policy* menekankan pentingnya perancangan kebijakan yang berpusat pada manusia dan berbasis data. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ide kreatif, tetapi juga pemahaman terhadap kompleksitas masalah, visi yang jelas, fokus pada kebutuhan warga, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ketahanan pangan di Cimahi, misalnya, solusi kebijakan tidak cukup hanya meningkatkan akses pangan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan kebijakan pertanian yang belum memadai.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan inovatif yang dapat diterapkan secara efektif. Di Cimahi *Innovathon Days*, keterlibatan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Selain itu, kepemimpinan yang bertanggung jawab sangat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan komitmennya dengan mengadopsi metode *policy hackathon*, yang tidak hanya membuka ruang partisipasi luas, tetapi juga menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, *policy hackathon* berfungsi sebagai metode strategis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *policy design* dan *design thinking*, seperti memahami kompleksitas masalah, membangun aliansi lintas sektor, berfokus pada kebutuhan warga, menetapkan visi kebijakan yang jelas, serta menekankan pada dampak nyata yang terukur. Tahapan implementasi program meliputi identifikasi tantangan kebijakan, ideasi solusi, pengembangan prototipe, serta evaluasi efektivitas kebijakan yang dirancang. Contoh konkret praktik ini terlihat pada program *One Day No Rice*, yang dirancang untuk mendukung diversifikasi pangan lokal berbasis singkong di kampung adat Cireundeun guna menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada beras. Fokus studi ini adalah mengevaluasi efektivitas penerapan *policy hackathon* dalam merancang kebijakan inovatif di sektor publik, dengan menilai kemampuan metode ini dalam memahami kompleksitas masalah, membangun kebijakan berbasis visi, memperkuat aliansi strategis, serta menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Policy hackathon memiliki potensi besar sebagai metode inovatif dalam perancangan kebijakan publik di tingkat lokal. Program Cimahi *Innovathon Days* menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi kebijakan tidak hanya bergantung pada ide kreatif, tetapi juga pada kemampuan untuk memahami kompleksitas permasalahan, membangun visi yang jelas, fokus pada kebutuhan masyarakat, serta menciptakan aliansi strategis lintas sektor. Elemen-elemen ini terbukti mampu menghasilkan kebijakan berbasis data yang relevan dan implementatif untuk menghadapi tujuh isu strategis di Kota Cimahi, seperti pengangguran, UMK, ketahanan pangan, *stunting*, sanitasi, pengelolaan sampah, dan partisipasi perempuan. Lebih lanjut, temuan penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam mendesain kebijakan publik. Dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara aktif, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya menjadi lebih inklusif tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, keberlanjutan hasil kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang bertanggung jawab dan evaluasi berkelanjutan.

terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Sebagai implikasi praktis, penelitian ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana *policy hackathon* dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah lain untuk mendorong inovasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang dihasilkan, serta mengeksplorasi pengembangan instrumen kebijakan baru yang relevan dengan konteks wilayah lain. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur inovasi kebijakan dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan tata kelola publik di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Cimahi khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi yang telah membantu terlaksananya penelitian hingga menjadi artikel ini, dan kepada seluruh rekan yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk diskusi, kritik, maupun saran perbaikan.

Referensi

- Alam, M. K. (2021). A systematic qualitative case study: questions, data collection, NVivo analysis and saturation. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 16(1), 1–31. <https://doi.org/10.1108/QR0M-09-2019-1825>
- Andari Ratna Widyastuti, T., Iqbal Ramadhani Mukhlis, M., Henrietta Imelda Tondong, Mk., Mohammad Djamil Nur, M. M., Rahmawati Ning Utami, Mpf., Sri Yani Kusumastuti Shelly Kurniawan, Ms., Loso Judijanto, M., Aryawira Pratama, Ms., Saktisyahputra, Mp., Ir Arwizet, Mik. K., Ture Simamora, M., Yoseb Boari, Ms., Lailatur Rohmah, Ms., Musran Munizu, M., Nita Purnamasari, M., Resnita Dewi, M., & Adolfina Krisifu, Mh. (n.d.). *METODOLOGI PENELITIAN (Panduan Lengkap Penulisan Karya Tulis Ilmiah)*. Retrieved October 21, 2024, from www.buku.sonpedia.com
- Barsei, A. N., Nugroho, S. A., Ghassani, G. A., & Trianita, L. N. (2023). Inovasi Digital pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mendorong Open Government. *Matra Pembaruan*, 7(2), 99–110. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.99-110>
- Bason, C. (2016). *Design for policy*. Routledge. https://www.routledge.com/Design-for-Policy/Bason/p/book/9780367670047?srsId=AfmBOooY9YIz00JfVvp7VMj4KOLL1Jne5ZrGjIE_mxDxeDboZt2109p
- Cameron, B. T. (2018). (PDF) Understanding policy workers' policy innovation capacity: An exploratory and qualitative mixed methods evaluation study of a policy hackathon program in Prince Edward Island, Canada | Bobby Thomas Cameron - Academia.edu. *Centre for Policy Innovation and Public Engagement, October*, 1–74. https://www.academia.edu/37768986/Understanding_policy_workers_policy_innovation_capacity_An_exploratory_and_qualitative_mixed_methods_evaluation_study_of_a_policy_hackathon_program_in_Prince_Edward_Island_Canada
- Chaminade, C., Lundvall, B. Åke, Vang, J., & Joseph, K. J. (2009). Designing innovation policies for development: Towards a systemic experimentation-based approach. *Handbook of Innovation Systems and Developing Countries: Building Domestic Capabilities in a Global Setting, January*, 360–379. <https://doi.org/10.4337/9781849803427.00022>
- Concilio, G., Molinari, F., & Morelli, N. (2017). Empowering citizens with open data by urban Hackathons. *Proceedings of the 7th International Conference for E-Democracy and Open Government, CeDEM 2017, May*, 125–134. <https://doi.org/10.1109/CeDEM.2017.28>
- Cutchins, D., Raw, L., & Welsh, J. M. (2010). *Redefining Adaption Studies*. Lanham, Maryland: Scarecrow Press. <https://rowman.com/ISBN/9780810872998/Redefining-Adaptation-Studies>
- Damanpour, F. (1992). Organizational Size and Innovation. *Organization Studies*, 13(3), 375–402. <https://doi.org/10.1177/017084069201300304>
- Darusman, F. (2017). KAPABILITAS DINAMIS SEKTOR PUBLIK : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 18(2), 1–12. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7925>
- Day, K., Humphrey, G., & Cockcroft, S. (2017). How do the design features of health hackathons contribute to participatory medicine? *Australasian Journal of Information Systems*, 21, 1383. <https://doi.org/10.3127/AJIS.V21I0.1383>

- Destiana, R. (2023). Kepemimpinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 437–460. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15762>
- Hadna, A. H. (2006). *Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada*. From CPPS: <http://cpps.ugm.ac.id/>
- Hardiana, R. (2024, July 18). *Pemkot Cimahi Raih Penghargaan Inovasi Smart City*. From Cimahikota.go.id: <https://cimahikota.go.id/berita/detail/82619-pemkot-cimahi-raih-penghargaan-inovasi-smart-city>
- Hasthoro, H. A., & Sunardi, S. (2016). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 53. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- Hendrawan, M. R. (2019). *Manajemen Pengetahuan: Konsep dan Praktik Berpengetahuan pada Organisasi Pembelajaran*. Malang: UB Press. <https://digilib.ub.ac.id/opac/detail-opac?id=80540>
- Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the effort? *Public Administration Review*, 64(1), 55–65. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x>
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Jember, U., Dampak, E., Collaborative, M., Pada, G., Sumber, P., Berkelanjutan, D., & Nurza, R. (2024). Evaluasi Dampak Model Collaborative Governance Pada Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 454–467. <https://journal.unej.ac.id/KONAMI/article/view/1097>
- Johnson, P., & Robinson, P. (2014). Civic Hackathons: Innovation, procurement, or civic engagement? *Review of Policy Research*, 31(4), 349–357. <https://doi.org/10.1111/ropr.12074>
- José, R., & Rodrigues, H. (2024). A Review on Key Innovation Challenges for Smart City Initiatives. *Smart Cities*, 7(1), 141–162. <https://doi.org/10.3390/smartcities7010006>
- Kabeer, N. (2021). Gender equality, inclusive growth, and labour markets. *Women's Economic Empowerment: Insights from Africa and South Asia*, 13–48. <https://doi.org/10.4324/9781003141938-3/GENDER-EQUALITY-INCLUSIVE-GROWTH-LABOUR-MARKETS-NAILA-KABEER>
- Khademian, A. M., Mergel, I., & Desouza, K. C. (2013). Administrative Profile. *Public Administration Review*, 73(6), 882–890. <https://doi.org/10.1111/puar.12141.Open>
- Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., Doss, C., & Theis, S. (2019). Women's land rights as a pathway to poverty reduction: Framework and review of available evidence. *Agricultural Systems*, 172, 72–82. <https://doi.org/10.1016/J.AGSY.2017.10.009>
- Garud, Raghu and Gehman, Joel and Kumaraswamy, Arun and Tuertscher, Philipp, From the Process of Innovation to Innovation as Process (January 20, 2016). *The Sage Handbook of Process Organization Studies, Forthcoming*, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2786644>
- George Towar Ikbai Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman - Metode Penelitian Kualitatif: Penerapan pada Kajian Politik Pemerintahan. Retrieved October 21, 2024, from [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=AH2REAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+kualitatif+pemerintahan&ots=v9W1S1_N_W&sig=oXJkqNLzRD6ia-ISNAklilb0Z3Q&redir_esc=y#v=onepage&q=metode penelitian kualitatif pemerintahan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=AH2REAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+kualitatif+pemerintahan&ots=v9W1S1_N_W&sig=oXJkqNLzRD6ia-ISNAklilb0Z3Q&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif%20pemerintahan&f=false)
- Mishra, M., & Mishra, S. K. (2012). Participation of rural women in household food security management. *Annals of Agricultural Research*, 33(1&2), 58–61. <https://epubs.icar.org.in/index.php/AAR/article/view/42646>
- Misdayanti S. (2021). S. M. (2021). Gambaran Sanitasi Lingkungan pada Masyarakat Pesisir Desa Bajo Indah, Afiasi : *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), pp. 19–29. <https://doi.org/10.31943/afiasi.v1i4.134>
- Molinari, F. (2011). Living Labs as multi-stakeholder platforms for the eGovernance of innovation. *ACM International Conference Proceeding Series*, 131–140. <https://doi.org/10.1145/2072069.2072092>
- Mostafa, A., Rahman, I., & Dorina, M. (2014). HOW RURAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECTS CAN USE THEIR BENEFITS FOR IMPROVING THE ECONOMICS STATES OF FARMERS. *Cadastre Series*.
- Nam, T. (2019). Determinants of local public employee attitudes toward government innovation: Government 3.0 in Korea. *International Journal of Public Sector Management*, 32(4), 418–434. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2018-0134>
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik. *PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 286. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.37095>
- Orr, G. (2003). Review Diffusion of Innovations, by Everett Rogers (1995). *Stanford University*, 1(3), 1–7. [http://web.stanford.edu/class/symbsys205/Diffusion of Innovations.htm](http://web.stanford.edu/class/symbsys205/Diffusion%20of%20Innovations.htm)

- Osborne, S. P., & Brown, L. (2011). Innovation in public services: engaging with risk. *Public Money & Management*, 31(1), 4-6.
- Salerno, M. S., Gomes, L. A. D. V., Da Silva, D. O., Bagno, R. B., & Freitas, S. L. T. U. (2015). Innovation processes: Which process for which project? *Technovation*, 35, 59-70. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.07.012>
- Schot, J., Steinmueller, W. E., Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2016). *FRAMING INNOVATION POLICY FOR TRANSFORMATIVE CHANGE : INNOVATION POLICY 3 . 0. October*, 0-26. <https://www.semanticscholar.org/paper/FRAMING-INNOVATION-POLICY-FOR-TRANSFORMATIVE-POLICY-Schot-Steinmueller/19d6f186b55199d043fe587fd9525923ab8de78d>
- Skarzynski, P., & Gibson, R. (2008). Innovation to the core - a blueprint for transforming the way your company innovates. *Harvard Business Press*, 3-295. <https://archive.org/details/innovationtocore0000skar>
- Smith, L., & Haddad, L. (2014). Reducing Child Undernutrition: Past Drivers and Priorities for the Post-MDG Era. In *IDS Working Papers* (Vol. 2014, Issue 441). <https://doi.org/10.1111/j.2040-0209.2014.00441.x>
- Studi, P., Masyarakat, K., Teknologi, I., Avicenna, K., & Kendari, I. (2021). Gambaran Sanitasi Lingkungan pada Masyarakat Pesisir Desa Bajo Indah. *Afiasi : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 19-29. <https://doi.org/10.31943/AFIASI.V1I1.134>
- Susanty, Y., & Yuningsih, Y. (2021). E-Gov Implementation Analysis Through SILPa KAMI Application in DISKOMINFOARPUS, Cimahi City. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(2), 1. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i2.696>
- Tobirin. (2020). Kontestasi Teoritik Epistemologi dan Relevansinya Terhadap Studi Administrasi Publik Kontemporer dalam Menghadapi Kenormalan Baru. In *Administrasi Publik New Normal* (Issue November). https://www.researchgate.net/publication/345177834_KONTESTASI_TEORITIK_EPISTEMOLOGI_DAN_RELEVANSINYA_TERHADAP_STUDI_ADMINISTRASI_PUBLIK_KONTEMPORER_DALAM_MENGHADAPI_KENORMALAN_BARU
- Uly, Y. A. (2023, May 24). *Sri Mulyani Keluhkan 24.000 Aplikasi Pemerintah Bikin Boros Anggaran*, *Menkominfo: Akan Ditutup*. From Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2022/07/12/140407226/sri-mulyani-keluhkan-24000-aplikasi-pemerintah-bikin-boros-anggaran-menkominfo>
- Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2010). *Handbook of Service Science*. 2008. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1628-0>
- Vujković, P., Ravšelj, D., Umek, L., & Aristovnik, A. (2022). Bibliometric Analysis of Smart Public Governance Research: Smart City and Smart Government in Comparative Perspective. *Social Sciences*, 11(7). <https://doi.org/10.3390/socsci11070293>
- Yogi Suwarno. (2008). *Inovasi Di Sektor Publik*. STIA-LAN Press, October, 2013-2015.
- Yuan, Q., & Gasco-Hernandez, M. (2021). Open innovation in the public sector: creating public value through civic hackathons. *Public Management Review*, 23(4), 523-544. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1695884>